

## RINGKASAN

Nama : Siti Sri Ramarlis  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesi : Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Dum)

(Dr. Muhammad Hatta, SH., LL.M. dan Dr. Herinawati, SH., M.Hum)

Tindak pidana perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi. Telah banyak kasus yang dalam sehari-hari nya mengalami peningkatan. Tentu saja dalam setiap tindak pidana yang terjadi memiliki objek, yang dimana pada tindakan pidana perdagangan orang tersebut yang kerap jadi objek yaitu anak serta perempuan. Di fase sekarang ini, perempuan dan anak harus diberikan arahan yang tepat dan bijak serta perlindungan hukum yang menjamin bahwa hak-hak mereka sebagai korban terlindungi.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia dalam perkara No 348/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, penelitian ini bersifat preskriptif, sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang meliputi pemberian rehabilitasi, pengawasan, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku, namun belum berjalan optimal sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal dari pihak terkait, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu tidak ada pengaturan hukum secara khusus mengenai prostitusi anak, kurang personil pendamping khusus bagi anak korban prostitusi, dan kurangnya Sumber Daya Manusia bidang anak. Upaya penanggulangannya yaitu memanfaatkan ketentuan hukum yang ada, dan memaksimalkan kinerja petugas yang ada. Pertimbangan hukum Hakim terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia telah terpenuhi Secara filosofi Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun pertimbangan hakim secara yuridis dan sosiologis yang cenderung meringankan pelaku (anak) dengan alasan perlindungan anak, namun seringkali mengabaikan aspek perlindungan maksimal bagi korban anak dan rasa keadilan publik, sehingga vonis terasa ringan dan tidak memberikan efek jeraa.;

Disarankan kepada instansi terkait dilakukan reformulasi terhadap kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia guna menguatkan kelemahan yang terdapat dalam kebijakan tersebut sehingga dapat mengendalikan atau mengatasi tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Prostitusi Anak, Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

## SUMMARY

Nama : Siti Sri Ramarlis  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesi : Legal Protection Against Child Prostitution as Victims of Human Trafficking Crimes (Study of Decision Number 348/Pid.Sus/2023/PN Dum)

(Dr. Muhammad Hatta, SH., LL.M. dan Dr. Herinawati, SH., M.Hum)

The crime of human trafficking is not something that is new. There have been many cases that in daily life are experiencing an increase. Of course, in every crime that occurs, there is an object, where in the criminal act of human trafficking that often becomes the object are children and women. In the current phase, women and children must be given appropriate and wise guidance as well as legal protection that ensures their rights as victims are protected.

The purpose of this study is to examine and understand legal protection against child prostitution as victims of human trafficking in case No. 348/Pid.Sus/2023/PN Dum.

This research uses a qualitative type of research, the research approach uses normative juridical, this research is prescriptive in nature, the data sources consist of primary data, secondary data, and tertiary data, data collection is conducted through literature study (library research).

The results of this study explain that legal protection for children, which includes providing rehabilitation, supervision, and strict sanctions for perpetrators, has not yet been optimally implemented, so children do not receive optimal legal protection from the relevant parties. This is caused by several obstacles, namely the absence of specific legal regulations regarding child prostitution, a lack of specialized personnel for accompanying child victims of prostitution, and a shortage of human resources in the field of children. The efforts to address it involve utilizing existing legal provisions and maximizing the performance of available officers. The Judge's legal considerations regarding child prostitution as a victim of human trafficking crimes have been fulfilled. Philosophically, the Panel of Judges considers that the Defendant has been responsible for his actions. However, the judge's considerations from a juridical and sociological perspective tend to mitigate the offender (child) under the pretext of child protection, but often neglect the aspect of maximum protection for child victims and the sense of public justice, making the verdict seem light and lacking a deterrent effect.

It is recommended that the relevant agencies reformulate the policies on combating human trafficking in Indonesia in order to strengthen the weaknesses present in those policies so that they can control or overcome human trafficking.

Kata Kunci : Legal Protection, Child Prostitution, Criminal Acts of Human Trafficking.